



PT. BPR. MULIA WACANA

Jalan Raya Sukawati - Glanyar - Ball
Telpon (0361) 296888

Nomor : 010/BMW/I/2023
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola- Good Corporate Governance**

Kepada Yth :
Perbarindo/Media BPR
Di Rumah Perbarindo
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan, laporan pelaksanaan tata kelola –Good Corporate Governance PT. BPR Mulia Wacana tahun 2022 sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perkenaan dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sukawati, 26 Januari 2023
PT. BPR. Mulia Wacana



Ni Ketut Prawati, SE
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Mulia Wacana

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505995-3-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601861-27012023113253

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprmulia.wacana@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-27 11:32:53



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jalan Raya Sukawati Br Tameng Desa sukawati Gianyar

Nomor Telepon : 0361296888

Penjelasan Umum : Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat . Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output. Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan perinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Penilaian GCG dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|------------------|--|---|
| 1 | Ni Ketut Erawati | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip prinsip kehati hatian. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya.- .Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. - Mewakili Direktur Utama untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. - Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan Anggaran Operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. - Bersama-sama Direktur Utama menyusun acuan RBB (Rencana Bisnis Bank) sesuai kondisi intern bank dan kondisi perekonomian terkini. - Mengevaluasi dan melakukan fungsi kontrol terhadap keseluruhan realisasi dan target setiap bulannya.- Memotivasi bawahannya untuk mencapai target. - Membuat dan mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, Rugi Laba kepada Dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham - Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham.- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja secara keseluruhan |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Semua rekomendasi komisaris sudah laksanakan oleh direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|---------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | Komisaris Utama | a.Melaksanakan koordinasi umum dalam pelaksanaan tugas tugas komisaris b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas Direksi atau pengurus yang setingkat c.Menyahkan atau menyetujui Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Direksi d.Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara periodic setiap enam bulan atau semester. e. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas dan Pembina, komisaris dapat memberikan teguran, pembinaan dan saran saran kepada Direksi. |
| 2 | Ni Wayan Suastini | Komisaris dan Independen | a. Melaksanakan koordinasi langsung dalam hal pembinaan , pengawasan , dan pengendalian terhadap tugas tugas direksi dan jajarannya. b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.c. Menghadiri rapat rapat yang disekenggarakan oleh Direksi dan unit dibawahnya |

Rekomendasi Kepada Direksi

1.Pembebanan kewenangan kepada Direktur Yang membahkan fungsi kepatuhan untuk melaksanakan tugas Dirut yang sudah meninggal dunia pada bulan juli 2022 2. Selalu kordinasai dengan komisaris atas hal-hal yang vital 3. melihat dana idle cukup/sangat besar maka pemasaran kredit ditingkatkan, perhitungan bunga lending ditinjau kalau perlu diturunkan agar bisa bersaing 4. Revisi RBB sesuai dengan kondisi perekonomian dan prediksi- prediksi perihal pertumbuhan ekonomi 5. Tingkatkan penagihan kredit, bila ada yang bisa diambil alih agunan atau dijual bersama.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak mempunyai komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak mempunyai anggota komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak mempunyai komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Ni Ketut Erawati | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak ada hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Ni Ketut Erawati | Tidak ada | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak ada hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | 1.000.000.000 | 20,00 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris utama memiliki saham Pada BPR 20 %

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | PT. Mulia Wacana Bali Jaya | 25,00 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama mempunyai saham di PT Mulia Wacana Bali Jaya 25 %

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | Tidak ada | tidak ada | Bendesa Mas Widiada/Pemegang Saham |
| 2 | Ni Wayan Suastini | Tidak ada | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki sahan di PT BPR Mulia wacana 20 %

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | Tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Ni Wayan Suastini | Tidak ada | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | Tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Ni Wayan Suastini | Tidak ada | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga sesama anggota komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 345367193 | 2 | 198000000 |
| 2 | Tunjangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 1 | 67200000 | 2 | 62170000 |
| | Total | | 412567193 | | 260170000 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|----|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Transportasi | Kendaraan | Kendaraan |
| 3 | Asuransi Kesehatan | BPJS Kesehatan | BPJS Kesehatan |
| 4 | Fasilitas lainnya | BPJS Ketenagakerjaan | BPJS Ketenagakerjaan |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 25-03-2022 | 2 | Rapat pencapaian RBB |
| 2 | 20-06-2022 | 2 | Pencapaian RBB |
| 3 | 12-09-2022 | 2 | Pencapaian RBB |
| 4 | 14-12-2022 | 2 | Pencapaian RBB |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat komisaris sudah dilaksanakan sesuai peraturan minimal 1 kali dalam 3 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Nyoman Bendesa Mas Widada | 4 | 0 | 100,00 |
| 2 | Ni Wayan Suastini | 4 | 0 | 100,00 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Setip rapat selalu dihadiri langsung oleh Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 belum ada penyimpangan internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|--|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam tahun 2022 belum ada permasalahan hukum

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| 1 | 20221220 | Kegiatan Sosial | Sumbangan pembangunan | Br Tameng Desa Sukawati Rutin setiap bulan Rp 100.000 | 1.200.000 |
| 2 | 20220114 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Kejuaraan Tenis Meja | Br Dlodpangkung Sukawati | 200.000 |
| 3 | 20220118 | Kegiatan Sosial | Sumbangan berhadiah | Br Selat Batuan Sukawati | 100.000 |
| 4 | 20220127 | Kegiatan Sosial | Sumbangan | Desa Batubulan kangin | 100.000 |
| 5 | 20220531 | Kegiatan Sosial | Sumb@ngan | Br Saba Blahbatuh | 150.000 |
| 6 | 20220621 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Porsebank Bali | BMPD Bali | 256.500 |
| 7 | 20220622 | Kegiatan Sosial | Sumb@ngan Sponsorsh!p | Desa Batubulan | 300.000 |
| 8 | 20220708 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Bazz@r | Br Buluh Desa Guwang Sukawati | 140.000 |
| 9 | 20220728 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Berhadiah | Desa Sukawati | 950.000 |
| 10 | 20220823 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Sponsorsh!p | Desa Sukawati | 200.000 |
| 11 | 20220909 | Kegiatan Sosial | Sumb@ngan berhadiah | Desa Batubulan Kangin | 500.000 |
| 12 | 20220913 | Kegiatan Sosial | Sumb@ngan Bazz@r | Desa Singapadu Tengah | 150.000 |
| 13 | 20221014 | Kegiatan Sosial | Sumb@ngan B@zz@r | Br Tameng Desa Sukawati | 150.000 |
| 14 | 20221205 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Gempa | Cianjur | 500.000 |
| 15 | 20221209 | Kegiatan Sosial | Sumb@ng@n B@zz@r | Br Dlodpangkung Desa Sukawati | 150.000 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk Kegiatan Politik selama tahun 2022 tidak ada

| | |
|----------------------|--|
| Nama BPR | : PT. BPR Mulia Wacana |
| Posisi Laporan | : 31-12-2022 |
| Alamat | : Jl. Raya Sukawati Br Tameng Desa Sukawati |
| Nomor Telepon | : 0361296888 |
| Modal Inti BPR | : 12.475.548.155,00 |
| Total Aset BPR | : 57.438.336.051,00 |
| Bobot BPR | : B |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit |
| Nilai Komposit | : 1,9 |
| Peringkat Komposit | : 2 |
| Analisis | : Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan penerapan tata kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur mencakup baik Struktur Tata Kelola, Proses, dan Hasil Tata Kelola PT BPR Mulia Wacana menetapkan Nilai Komposit 1.9 dengan Peringkat komposit 2 Baik, penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor penilaian. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan umum menunjukkan bahwa masih ada factor factor positif dari aspek struktur dan proses tata Kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata Kelola BPR yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan menjaga resiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemic covid-19. Kekuatan Pelaksanaan GCG : a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi, b. Meningkatkan pelaksanaan audit intern secara independent,c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan, APU PPT, dan manajemen risiko di seluruh tingkatan organisasi, d. Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis, serta pengawasan terhadap RBB |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|--|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 0,75 | 0,45 | 0,18 | 1,38 | 0.276 | Secara umum Direksi PT BPR Mulia Wacana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK namun, sampai Desember 2022 BPR masih 1 Direksi karena Dirut bulan juli meninggal dunia dan sudah mengajukan calon ke OJK |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,67 | 0,55 | 0,20 | 1,42 | 0.213 | Dewan Komisaris PT BPR Mulia wacana berjumlah 2 orang sudah terpenuhi sesuai dengan POJK . Secara Umum Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu dilakukan penyempurnaan terhadap perkembangan peraturan terbaru dari OJK dan otoritas lainnya |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | Modal inti bank kurang dari Rp 50M sehingga belum membentuk komite |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100 | 0,50 | 0,80 | 0,20 | 1,50 | 0.150 | Selama tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0,100 | 1,50 | 1,12 | 0,20 | 2,82 | 0.282 | Penerapan Fungsi Kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan ditetapkan nya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 1,10 | 1,00 | 0,20 | 2,30 | 0.230 | Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank berjalan efektif independen dan obyektif serta sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 1,00 | 0,40 | 0,15 | 1,55 | 0.039 | Pelaksanaan Audit Ekstern oleh KAP sangat efektif kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100 | 1,34 | 1,08 | 0,20 | 2,62 | 0.262 | Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk manajemen risiko dan bank sudah melaporkan laporan profil risiko disetiap semester |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075 | 2,00 | 0,80 | 0,10 | 2,90 | 0.218 | Selama tahun 2022 tidak ada pelampauan BMPK |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075 | 0,84 | 0,60 | 0,10 | 1,54 | 0.116 | Bank telah menyampaikan rencana kerja termasuk perubahannya kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 1,00 | 0,60 | 0,10 | 1,70 | 0.128 | Bank telah menyusun laporan dan menyampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan |
| Nilai Komposit | | | | | | 1.9 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Baik | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 3 | Semenjak bulan Juli 2022 Direktur Utama BPR meninggal dunia dan sampai Desember memiliki 1 Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan bulan Desember 2022 sudah mengajukan calon Direksi Ke OJK |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 2 | Semua Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 1 | Sudah sesuai dengan ketentuan tidak ada rangkap jabatan |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 1 | Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1 | Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan sebagai konsultan. |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 1 | Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat oleh RUPS |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,75 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 1 | Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2 | Direksi memonitor temuan audit yang masih belum diselesaikan yang berkaitan dengan fungsi Bank di Indonesia agar dapat diselesaikan tepat waktu |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 1 | Sudah tepat waktu |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1 | Pengambilan keputusan sudah berdasarkan musyawarah mufakat |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | Para Anggota Direksi Telah Membuktikan kredibilitas dan integritas mereka dan tidak mengambil keuntungan dari Bank untuk manfaat pribadi, ataupun menyebabkan kerugian pada Bank. Prosedur pengawasan dan pengendalian internal juga mencegah Direksi atau staf melakukan hal ini |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 1 | Direksi membudayakan pelajaran antara lain dengan mendukung pelatihan bagi karyawan melalui beberapa pilihan pembelajaran seperti pelatihan kerja melalui internal /web /online /dikelas |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 1 | Semua anggota Direksi memiliki latar belakang dan pengalaman yang telah membuktikan kredibilitas dan integritas dan kompetensi dalam bidang mereka masing-masing |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 1 | Karena semua anggota Direksi merupakan karyawan, maka mereka semua tunduk pada peraturan |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,13 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,45 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 1 | Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya melalui laporan |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 3 | Belum sepenuhnya dikomunikasikan |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 2 | Risalah rapat diedarkan, tetapi dokumentasinya kurang |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2 | Sudah ada peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan BPR berdasarkan pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan yang diikutsertakan |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 1 | Sudah menyampaikan ke OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,80 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,18 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 1 | Sampai tahun 2022 BPR sudah memiliki 2 komisaris |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 2 | Jumlah Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi, karena bulan juli 2022 Dirut meninggal dunia dan pada bulan Desember 2022 sudah mengajukan calon ke OJK |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 1 | Semua anggota Komisaris telah lulus Fit and Profer Test dan sudah mendapat persetujuan perpanjangan masa jabatan dari Otoritas Jasa Keuangan |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Semua anggota Komisaris berdomisili di provinsi yang sama dimana lokasi BPR didirikan |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Salah satu komisaris BPR merupakan Komisaris independen |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 2 | Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja meliputi etika kerja, waktu kerja, dan rapat |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 1 | Kedua komisaris tidak ada merangkap jabatan Bank lain |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 1 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 1 | Komisaris Independen di PT BPR Mulia wacana tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi |
| | Total nilai skala penerapan | 12 | |
| | Rata-rata | 1,33 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,67 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 1 | Dewan komisaris selalu memberikan nasehat kepada Direksi terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan BPR |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 2 | Dalam pengawasan Komisaris selalu melakukan pengarahannya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1 | Dewan Komisaris hanya terlibat saat penyediaan dana kepada pihak terkait dan BMPK |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 1 | Sudah menyampaikan hasil tindak lanjut temuan OJK |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Ya, setidaknya 1 kali dalam 3 bulan untuk mengkaji kinerja BPR bersama dengan pengkajian laporan yang disampaikan ke OJK dan hal penting lainnya yang perlu dibahas |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | Setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis selalu berdasarkan musyawarah mufakat |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris selalu berpedoman pada RUPS |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 2 | Selalu melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi kepatuhan |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 1,38 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,55 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2 | Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | Keterangan |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | Keterangan |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 1 | Bank melaksanakan bisnis sesuai dengan prinsip bahwa bank harus mengelola benturan kepentingan secara adil. Karyawan diharuskan untuk melaporkan apabila mempunyai benturan kepentingan tetapi belum mempunyai kebijakan tersebut |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2 | Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan maka tidak ada suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 2 | Bank belum pernah mengalami kerugian atau penurunan laba akibat benturan kepentingan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 4 | Karena Direktur Utama yang menjalani fungsi bisnis per juli 2022 meninggal dunia maka Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan langsung menangani penyaluran dana |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 3 | Sudah memahami tapi masih perlu belajar |
| 3 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> | 1 | Sudah ada PE yang menangani fungsi kepatuhan yang telah disetujui oleh OJK |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 4 | Sudah sebagian mengkinikan pedoman kerja sesuai peraturan internal maupun peraturan eksternal |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 3 | Sudah memiliki |
| | Total nilai skala penerapan | 15 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | Nilai struktur | 1,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 3 | Kepatuhan senantiasa memberikan informasi perihal peraturan kepada pihak yang berkepentingan |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 2 | Direksi kepatuhan juga membantu menjelaskan peraturan baru/ perubahan apabila diperlukan atau mengadakan pelatihan kepada yang lebih mampu mensosialisasikan peraturan tersebut |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | Direksi kepatuhan menerima semua peraturan baru dan menyebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan dengan memberikan penjelasan terhadap isi dan dampak dari peraturan tersebut |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | Kepatuhan independen terhadap seluruh kegiatan BPR agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | Semua kebijakan yang berkaitan dengan unit Kepatuhan ditetapkan dari tingkat global Penyesuaian perubahan untuk mematuhi peraturan lokal yang berlaku harus disetujui oleh kantor regional |
| | Total nilai skala penerapan | 14 | |
| | Rata-rata | 2,80 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,12 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 2 | Bank senantiasa untuk selalu mengurangi jumlah pelanggaran |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2 | Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Belum pernah menyampaikan laporan khusus, apabila ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan akan menyampaikan laporan tersebut |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | Telah memiliki PE audit intern, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 2 | Setiap tahun telah memiliki Pedoman kerja, sistem dan pedoman kerja sudah disetujui oleh Direktur Utama dan Komiaris |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 2 | Sudah sesuai dengan pedoman kerja |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 2 | Sudah sesuai |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 4 | belum ada |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 2,20 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,10 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 2 | Bank telah menyusun pedoman audit yang melakukan fungsi pengawasan |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Kaji ulang terhadap pelaksanaan kerja audit eksternal telah melakukan kerja sama dengan baik maksimal 3 tahun sekali |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern secara independen masih banyak ditemukan kekurangan |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 3 | Untuk peningkatan mutu ketrampilan SDM dilakukan secara berkala dan berkelanjutan |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,50 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | Tugas-tugas audit intern yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern bank guna meningkatkan kinerja audit intern itu sendiri untuk melakukan pemeriksaan |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sudah dilaporkan |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Masih terdapat temuan yang sama terutama didalam analisa kredit |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--------------------------------------|
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 2 | Sudah dilakukan sesuai ketentuan OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2 | Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh OJK telah dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk Bank |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 1 | Penunjukan KAP telah disetujui oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah dilaporkan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | Management Letter dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik dan KAP menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian segera |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Cakupan hasil audit Akuntan publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,15 | |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|--|-----------------|---|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 1 | Penunjukan PE yang menangani fungsi kepatuhan Telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK pada tanggal 05 September 2022 dengan no surat S-263/KR.0812/2022 dan merangkap sebagai manajemen risiko, Pejabat APU dan PPT |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 2 | BPR telah memiliki SOP kebijakan management risiko |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 5 | belum sepenuhnya memiliki |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,34 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 4 | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p> | 3 | BPR telah memiliki, menyusun, dan mengevaluasi kebijakan dan penerapan management risiko |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| 5 | Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 3 | Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan management risiko |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 3 | BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan seluruh faktor risiko |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 2 | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah menerapkan MR sesuai dengan ketentuan OJK |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 3 | BPR telah memiliki sistem yang memadai |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 3 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya MR melalui sosialisasi |
| | Total nilai skala penerapan | 19 | |
| | Rata-rata | 2,71 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,08 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | BPR telah menyusun laporan profil risiko posisi Desember 2022 dan dikirim dibulan Januari 2022 di semster ke 2 dengan 4 jenis risiko sesuai dengan POJK |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | BPR akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru (apabila ada) |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 4 | BMPK diatur dalam BKP |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 4,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 2,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 3 | Telah dilakukan evaluasi |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 1 | Telah memenuhi ketentuan OJK dan mengedepankan prinsip kehati-hatian |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Telah dilaporkan ke OJK |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 1 | Rencana Bisnis BPR telah disusun berdasarkan visi dan misi bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang yang bisa melihat pertumbuhan bank yang berkesinambungan |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 2 | Rencana Bisnis BPR didukung oleh sepenuhnya oleh pemegang saham antara lain tercermin dari komitmen dan upaya untuk memperkuat permodalan bank |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,84 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | 2 | Dalam penyusunan RBB sudah berpedoman pada 3 point disamping |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 1 | Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB ini bisa dilihat dari RBB yang sudah disusun harus dikomunikasikan dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,60 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 1 | Rencana Bisnis BPR telah disusun berdasarkan visi dan misi bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang yang bisa melihat pertumbuhan bank yang berkesinambungan |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 2 | Rencana Bisnis BPR didukung oleh sepenuhnya oleh pemegang saham antara lain tercermin dari komitmen dan upaya untuk memperkuat permodalan bank |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,84 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | 2 | Dalam penyusunan RBB sudah berpedoman pada 3 point disamping |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 1 | Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB ini bisa dilihat dari RBB yang sudah disusun harus dikomunikasikan dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,60 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|-----------------|--|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | Tersedianya sistem pelaporan yang akurat, cukup atau tepat waktu |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur internal sesuai dengan ketentuan OJK |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah disesuaikan dengan ketentuan |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur internal sesuai dengan ketentuan OJK |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Sudah dilakukan sesuai dengan aturan OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,60 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan publikasi ditandatangani oleh anggota Direksi secara lengkap dan akurat |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 1 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mulia Wacana

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola

Nama BPR : PT. BPR Mulia Wacana
Alamat : Jl. Raya Sukawati, Br Tameng Desa Sukawati
Kabupaten : Gianyar

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank perkreditan Rakyat, maka kami Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Mulia Wacana periode 31 Desember 2022.

Sukawati, 19 Januari 2023
PT. BPR Mulia Wacana



Ni Ketut Erawati
Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nyoman Bendesa Mas Widiada".

Nyoman Bendesa Mas Widiada
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ni Wayan Suastini".

Ni Wayan Suastini
Komisaris

KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "baik," Adapun dasar pertimbangannya adalah karena pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisari sudah dipenuhi namun disisi Direksi Direktur Utama pada bulan Juli meninggal dunia sampai bulan Desember 2022 Direksi BPR masih 1 orang dan sudah mengajukan calon ke OJK pada bulan Desember 2022 .
2. Bank telah membuat SOP *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan kedepan tata kelola bank akan lebih baik sehingga semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
6. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR
7. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
8. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.

9. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR Mulia wacana dengan alamat <http://www.bprmuliawacana.com>

Sukawati, 19 Januari 2023
PT. BPR Mulia Wacana



Ni Ketut Erawati
Direktur

Nyoman Bendesa Mas Widiada
Komisaris Utama

Ni Wayan Suastini
Komisaris